

**MITIGASI RISIKO LONJAKAN KEMISKINAN PASCA-BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI ACEH**
**MITIGATING THE RISK OF A SURGE IN POVERTY FOLLOWING
HYDROMETEOROLOGICAL DISASTERS IN ACEH PROVINCE**

Taufiq Fahrizal

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

ABSTRAK

Policy brief ini menganalisis risiko lonjakan kemiskinan di Provinsi Aceh pasca-bencana hidrometeorologi, khususnya akibat *Siklon Tropis Senyar* pada akhir 2025. Meskipun tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi 12,22 persen, angka ini berpotensi bias akibat jeda data yang tidak mencerminkan kondisi pasca-bencana. Analisis menunjukkan adanya kontraksi konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi, serta peningkatan indeks kedalaman (P1) dan keparahan (P2) yang mencerminkan kerentanan kemiskinan pra-bencana (*pre-existing fragility*). Gangguan pada sektor pertanian dan konstruksi turut memperburuk kerentanan, terutama di wilayah perdesaan. Mengacu pada kerangka *poverty trap* dan *capability deprivation*, kondisi ini berisiko mendorong kemiskinan persisten. Oleh karena itu, direkomendasikan kebijakan perlindungan sosial responsif bencana, stabilisasi harga komoditas utama, dan rehabilitasi sektor produktif berbasis padat karya.

Kata Kunci: kemiskinan, bencana hidrometeorologi, inflasi, perlindungan sosial, *poverty trap*

ABSTRACT

This policy brief analyzes the risk of a post-disaster surge in poverty in Aceh Province following Tropical Cyclone Senyar in late 2025. Although the official poverty rate declined to 12.22 percent, this figure is likely biased due to data lag and does not reflect post-disaster conditions. The analysis identifies declining household consumption, rising inflation, and an increase in the poverty depth (P1) and severity (P2) indices reflecting pre-disaster vulnerability (pre-existing fragility), alongside disruptions in agriculture and construction that intensify rural vulnerability. Drawing on the concepts of poverty traps and capability deprivation, the study highlights the risk of persistent poverty without timely intervention. It therefore recommends disaster-responsive social protection, targeted price stabilization, and labor-intensive sectoral rehabilitation to strengthen economic resilience.

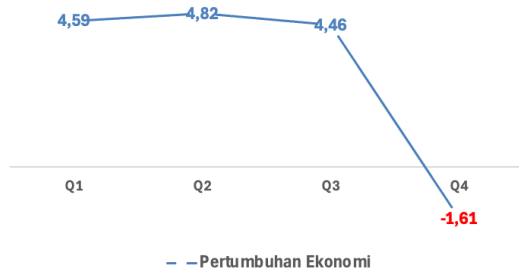
Keywords: poverty, hydrometeorological disasters, inflation, social protection, poverty traps

A. Pendahuluan

Perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2025 menampilkan sebuah dikotomi yang mengkhawatirkan antara pertumbuhan agregat dan stabilitas triwulanan. Secara kumulatif (*c-to-c*), Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh [BPS Aceh], 2026). Namun, angka ini

cenderung menjadi "ilusi statistik" yang menutupi degradasi ekonomi pada penghujung tahun, di mana pada Triwulan IV-2025 terjadi kontraksi signifikan sebesar 1,61% secara *year-on-year* (*y-on-y*) (BPS Aceh, 2026). Guncangan ini dipicu oleh faktor eksogen destruktif, yakni Siklon Tropis Senyar pada November 2025, yang

memicu disrupsi masif pada sektor-sektor produktif dan menginterupsi tren pemulihan pasca-pandemi.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh per Triwulan 2025 (y-on-y)
 Sumber: BPS Provinsi Aceh (2026), *Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025*

Dilihat dari lensa teoritis Carter et al. (2007), fenomena ini berpotensi menciptakan jerat kemiskinan (*poverty traps*) di mana bencana alam merampas basis aset rumah tangga rentan secara mendadak, membuat mereka kehilangan kapasitas untuk pulih secara mandiri tanpa intervensi eksternal. Masalah fundamental yang dihadapi pembuat kebijakan saat ini adalah risiko *blind spot* akibat jeda data (*data lag*). Angka kemiskinan terakhir yang dirilis pada Februari 2026 adalah sebesar 12,22%. Walaupun konsisten menurun namun data ini tidak menggambarkan keadaan riil karena diambil sekitar satu bulan sebelum siklon melanda, yakni melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 yang dirilis oleh BPS pada Februari 2026, sehingga terdapat asimetri informasi antara statistik resmi dan realitas lapangan pasca November 2025.

Menurut Sen (1976), kemiskinan harus dipandang sebagai *capability deprivation*, di mana penduduk kehilangan akses terhadap fungsi-fungsi dasar ekonomi. Siklon Senyar tidak menyerang entitas yang stabil, melainkan mengeksploitasi *pre-existing fragility* di mana indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan telah memburuk secara signifikan sebelum guncangan fisik terjadi.

Sebagai respons awal terhadap ancaman ini, Pemerintah Aceh telah menetapkan status tanggap darurat dan mengoordinasikan penyaluran bantuan logistik, evakuasi, serta perbaikan infrastruktur fisik melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, yang secara khusus disasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar mendesak dan pemulihan fisik di wilayah terdampak. Namun, intervensi yang berjalan saat ini masih bersifat reaktif, berjangka pendek, dan belum secara eksplisit menyasar mitigasi risiko kemiskinan struktural maupun pencegahan jerat kemiskinan (*poverty traps*) akibat guncangan ekonomi pasca-bencana.

Kebergantungan pada indikator kemiskinan historis September 2025 yang dirilis pada Februari 2026 ini berisiko mengabaikan fakta adanya pelemahan daya beli masif akibat kontraksi konsumsi rumah tangga sebesar 6,69 persen (*q-to-q*) dan tekanan inflasi 6,94 persen (*y-on-y*) pasca-bencana. Berdasarkan skenario sederhana, jika elastisitas kemiskinan terhadap konsumsi berkisar antara -0,3 hingga -0,5 (sebagaimana tercatat dalam berbagai studi BPS dan Bank Dunia), kontraksi konsumsi sebesar 6,69 persen berpotensi menaikkan angka kemiskinan sebesar 2,0 hingga 3,3 persen poin dari level 12,22 persen menjadi 14,2 hingga 15,5 persen pada 2026. Tanpa antisipasi strategis, Aceh menghadapi risiko lonjakan kemiskinan masif pada 2026 yang belum terpetakan dalam survei terakhir.

B. Analisis dan Pembahasan

1. **Guncangan Konsumsi dan Kontraksi Sektoral.** Guncangan paling destruktif terlihat pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami kontraksi tajam sebesar 6,69 persen (*q-to-q*) pada akhir tahun 2025 (Tabel 5, BPS Aceh, 2026a). Kontraksi komponen konsumsi yang jauh lebih

dalam dibandingkan agregat PDRB (-0,05% *q-to-q*) ini mengindikasikan bahwa guncangan Siklon Tropis Senyar (akhir November 2025) memberikan dampak terpusat yang destruktif pada daya beli rumah tangga, meskipun lapangan usaha lain seperti pertanian (yang sedang musim panen di Triwulan IV) masih mampu menopang agregat. Penurunan daya serap pasar domestik ini mengindikasikan bahwa rumah tangga sedang berada dalam *fase defisit likuiditas* akut. Berdasarkan tesis Carter et al. (2007), kondisi ini memicu *asset poverty* yang persisten dimana rumah tangga terpaksa mengorbankan aset produktif untuk menutupi kebutuhan konsumsi dasar, yang secara jangka panjang akan menjebak mereka dalam kemiskinan struktural.

2. Dinamika Inflasi dan Erosi Daya Beli.

Hingga Februari 2026, Aceh menghadapi tekanan inflasi sebesar 6,94 persen (y-on-y) dengan IHK mencapai 113,96 atau jauh di atas inflasi nasional. Kondisi ini terutama didorong oleh penyesuaian tarif listrik, kenaikan harga emas perhiasan, dan tekanan pasokan pangan pasca-bencana. Secara spasial, Kabupaten Aceh Tengah mengalami inflasi tertinggi sebesar 8,44 persen (BPS Aceh, 2026c). Seluruh angka andil di bawah ini merujuk pada inflasi tahunan (y-on-y), bukan bulanan. Disagregasi data menunjukkan:

- a. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (16,98% y-on-y, andil 2,37%): tarif listrik menjadi penyumbang dominan sebesar 2,19%, didorong oleh lonjakan subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 48,61% (y-on-y).
- b. Perawatan pribadi dan jasa lainnya (18,43% y-on-y, andil 1,07%): dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan (andil 0,99%).

- c. Penyediaan makanan dan minuman (8,86% y-on-y, andil 0,95%): nasi dengan lauk andil 0,44%.
- d. Makanan, minuman, dan tembakau (5,82%): komoditas beras menjadi kontributor krusial dengan andil 0,85 persen terhadap inflasi.

3. Degradasi Kualitas Kemiskinan: Analisis Indeks P1 dan P2.

Meskipun angka kemiskinan makro turun tipis menjadi 12,22 persen pada September 2025, kualitas kesejahteraan justru terdegradasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tingkat provinsi melonjak dari 1,836 ke 2,055, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tingkat provinsi naik dari 0,420 ke 0,523 (BPS Aceh, 2026b). Kenaikan ini mengonfirmasi bahwa rapta-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari Garis Kemiskinan (Rp715.103 per kapita/bulan). Di perdesaan, di mana Garis Kemiskinan berada pada Rp693.085, persentase penduduk miskin justru meningkat dari 14,44 persen menjadi 14,51 persen. Ketimpangan di lapisan terbawah ini menciptakan hambatan struktural yang berat bagi mobilitas ekonomi vertikal pasca-bencana.

4. Risiko Transmisi Sektoral dan Ancaman Ketahanan Pangan.

Sektor Pertanian (32,74% PDRB) menghadapi tekanan ganda. Sebelum Siklon Senyar melanda, produksi padi pada September 2025 tercatat 191,96 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), turun 8,32% dibandingkan September 2024 (BPS Aceh, 2026d). Guncangan eksogen memperparah kondisi ini; pada November 2025 produksi anjlok 61,7% dibandingkan November 2024. Secara tahunan, produksi padi Aceh sepanjang 2025 turun 2,70% menjadi 1,62 juta ton GKG. Kombinasi kerentanan ini, ditambah kontraksi di sektor Konstruksi (-8,42% y-on-y) dan Pertambangan (-17,79% y-on-y), menciptakan krisis ganda bagi ketahanan pangan dan tenaga

kerja non-formal. Dalam kondisi seperti ini, World Bank (2022) menekankan urgensi perlindungan sosial adaptif untuk melindungi petani kecil tanpa skema asuransi memadai.

C. Alternatif Pilihan Kebijakan

Dalam upaya memitigasi risiko lonjakan kemiskinan di Aceh pada 2026, diperlukan bauran kebijakan yang reaktif terhadap bencana dan antisipatif terhadap inflasi struktural. Berikut tiga opsi kebijakan strategis yang diusulkan:

1. **Opsi 1: Jaring Pengaman Sosial Responsif Bencana (JPS-RB).** Pemerintah perlu segera memobilisasi bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) yang diarahkan secara spesifik untuk melindungi daya beli penduduk di wilayah perdesaan. Urgensi kebijakan ini didasarkan pada fakta bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan telah mulai menunjukkan tren kenaikan dari 14,44 persen menjadi 14,51 persen pada September 2025. Intervensi ini menjadi krusial untuk menahan dampak kontraksi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencapai 6,69 (*q-to-q*) persen pada Triwulan IV-2025 akibat guncangan *Siklon Tropis Senyar*. Selain itu, mengingat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) perdesaan melonjak dari 2,197 menjadi 2,527 (BPS Aceh, 2026b), bantuan tunai diharapkan dapat memperpendek jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis batas, sehingga mencegah mereka terjebak dalam kemiskinan kronis pasca-bencana.
2. **Opsi 2: Intervensi Stabilitas Harga dan Subsidi Terpilih** Menghadapi inflasi tahunan Februari 2026 yang mencapai 6,94 persen, diperlukan intervensi harga pada komoditas yang memiliki andil pembentukan Garis Kemiskinan (GK) terbesar. Subsidi tarif listrik sementara menjadi prioritas utama karena komoditas ini

memberikan andil inflasi tunggal terbesar yaitu 2,19 persen. Di sektor pangan, operasi pasar intensif harus difokuskan pada beras, yang menyumbang 25,12 persen terhadap Garis Kemiskinan di perdesaan dan memberikan andil inflasi sebesar 0,85 persen. Kebijakan ini harus diprioritaskan di wilayah dengan tekanan harga ekstrem seperti Kabupaten Aceh Tengah, di mana inflasi menyentuh angka 8,44 persen. Pengendalian harga pada komoditas "GK-sensitif" ini secara teoretis akan menahan laju kenaikan nilai Garis Kemiskinan, sehingga penduduk "hampir miskin" tidak jatuh ke bawah garis tersebut.

3. **Opsi 3: Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Sektor Konstruksi melalui Padat Karya** Kontraksi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,42 persen (*y-on-y*) pada Triwulan IV tahun 2025 mencerminkan terhentinya proyek-proyek fisik akibat cuaca ekstrem. Untuk mengatasinya, program rehabilitasi infrastruktur irigasi dan lahan pertanian yang rusak akibat Siklon Tropis Senyar harus segera diimplementasikan dengan skema padat karya. Pilihan ini sangat strategis mengingat sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi Aceh dengan kontribusi 32,74 persen terhadap PDRB dan menyerap 38,75 persen tenaga kerja. Program ini juga berfungsi sebagai katup pengaman untuk menyerap lonjakan setengah pengangguran yang naik 2,11 poin (menjadi 15,94%) serta pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian yang paling terdampak oleh ketidakpastian ekonomi pasca-bencana. Dengan memulihkan infrastruktur irigasi, kapasitas produksi padi yang sempat menurun pada September 2025 dapat segera dikembalikan, sekaligus menyediakan jaring pengaman pendapatan bagi pekerja informal.

Tabel 1. Perbandingan Opsi Kebijakan

Kriteria	Opsi 1: JPS-RB	Opsi 2: Subsidi Harga	Opsi 3: Rehab Sektoral
Estimasi Dampak	Tinggi (Langsung pada P1/P2)	Sedang (Meredam inflasi)	Tinggi (Stabilitas jangka panjang)
Biaya Implementasi	Menengah	Tinggi (Beban Fiskal)	Sangat Tinggi
Kecepatan Respon	Sangat Cepat	Menengah	Lambat (Proses Konstruksi)

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data BPS Aceh (2026)

Tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa Opsi 3 (Rehab Sektoral) memiliki biaya 'Sangat Tinggi' dan kecepatan respon 'Lambat' dibandingkan Opsi 1 dan 2. Namun, Opsi 3 tetap dipertahankan sebagai alternatif krusial karena Opsi 1 dan 2 bersifat meredam gejala (stabilisasi daya beli), tanpa memulihkan basis aset produktif rumah tangga. Tanpa Opsi 3, risiko *poverty trap* jangka panjang akibat hilangnya kapasitas produksi pertanian dan konstruksi tetap tinggi. Karena itu, ketiga opsi tidak bersifat saling menggantikan (*mutually exclusive*), melainkan saling melengkapi dalam kerangka waktu berbeda.

D. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis *trade-off* di atas, kami merekomendasikan bauran kebijakan dengan urutan prioritas yang jelas untuk memitigasi risiko lonjakan kemiskinan di tengah kendala fiskal:

Prioritas 1: Stabilisasi Daya Beli Jangka Pendek (Bulan 1–3). Fokus pada intervensi fiskal cepat untuk menahan laju inflasi dan kontraksi konsumsi:

- Aktor Pelaksana: Dinas Sosial Aceh, BPBA, Perum Bulog Divisi Regional Aceh, dan PT PLN (Persero).
- Aksi Konkret: Mobilisasi JPS-RB yang ditargetkan pada rumah tangga di perdesaan dengan P1 tinggi, serta operasi pasar beras dan subsidi listrik sementara untuk daya 450-900 VA,

khususnya di wilayah dengan inflasi ekstrem seperti Aceh Tengah.

- Skema Pendanaan: Dana Siap Pakai (DSP) BNPB untuk tanggap darurat bencana, APBA untuk subsidi daerah, dan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk subsidi listrik nasional.
- Indikator Keberhasilan: Inflasi Aceh turun ke bawah 5% (*y-on-y*) pada Agustus 2026, dan P1 perdesaan tidak naik lebih dari 0,2 poin pada Susenas September 2026.

Prioritas 2: Resiliensi Struktural Jangka Menengah (Bulan 4–12)

Fokus pada pemulihan kapasitas produktif untuk mencegah kemiskinan persisten (*poverty trap*).

- Aktor Pelaksana: Dinas Pertanian dan Pangan Aceh, Dinas Pengairan Aceh, dan Dinas PUPR Aceh.
- Aksi Konkret: Implementasi Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Padat Karya. Rehabilitasi irigasi rusak dan penyediaan benih tahan banjir, dengan menyerap tenaga kerja informal dari sektor konstruksi yang terkontraksi.
- Skema Pendanaan: Dana rehabilitasi pasca-bencana dari BNPB, APBA, dan Dana Desa.
- Indikator Keberhasilan: Rehabilitasi 500 hektare irigasi rusak, penyerapan 10.000 tenaga kerja informal, dan pemulihan produksi padi ke level minimal 190.000 ton GKG per triwulan pada 2026.

Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh dan beberapa instansi terkait lainnya harus melakukan pemantauan berkala terhadap pergerakan Garis Kemiskinan (GK) dan komoditas "sensitif kemiskinan" (beras, tarif listrik, rokok). Penggunaan data *real-time* dari pasar tradisional dan data administratif desa harus diintegrasikan untuk memastikan intervensi tepat sasaran sebelum rilis Susenas berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Carter, M. R., Little, P. D., Mogues, T., & Negatu, W. 2007. "Poverty traps and natural disasters in Ethiopia and Honduras." *World Development*, 35(5), 835-856.

Sen, A. (1976). Poverty: an ordinal approach to measurement. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 219-231

Dokumen

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026a. "Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Triwulan IV-2025." *Berita Resmi Statistik No. 13/02/11/Th. XXIX*, 5 Februari 2026.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026b. "Profil Kemiskinan Aceh September 2025." *Berita Resmi*

Statistik No. 14/02/11/Th. XXIX, 5 Februari 2026.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026c. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Aceh Februari 2026. *Berita Resmi Statistik No. 17/03/11/Th. XXIX*: 02 Maret 2026

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2026d. "Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Aceh 2025 (Angka Tetap)." *Berita Resmi Statistik No. 11/02/11/Th. XXIX*, 2 Februari 2026.

Gubernur Aceh. 2025. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.

World Bank. 2022. *Indonesia Poverty Assessment: Pathways out of Poverty*. Washington, DC: World Bank Group.